

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN**

---

**Imam Sukadi<sup>1</sup>, Gatot Sapto Heriyawanto<sup>2</sup>, Mila Rahayu Ningsih<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup> Advokat

[imam.sukadi@gmail.com](mailto:imam.sukadi@gmail.com)

**Abstrak:** Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam realitanya, negara seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan konsep welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perawatan, dan pembinaan. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan haruslah memihak dan memperhatikan berbagai permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia.

**(Abstract:** *The constitution mandates the state to create prosperity as stipulated in the articles of the 1945 Constitution, but in reality, the state does not seem to have the power to form a prosperous society. The conception of the Indonesian welfare law state requires that every action of the state or government be based on law, guaranteeing security and public order, making the concept of the welfare state the basis for the position and function of the government (bestuursfunctie) in carrying out duties and broader responsibilities for the welfare of the people and making justice social. The 1945 Constitution in Article 34 Paragraph 1 states that the poor and waif are cared for by the state. Thus the state is responsible for meeting the basic needs of the poor and waif, namely proper needs for humanity, and in implementing the care for waif in Indonesia, it is carried out by giving them their rights normally like children in general, namely civil rights. and the rights to freedom, health, welfare, education, care and development. The State's function in caring for waif can be realized if the government as a policy maker and or laws and regulations must take sides and pay attention to the various problems of waif in Indonesia)*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak Terlantar, Negara Kesejahteraan

## PENDAHULUAN

Anak-anak yang dijerumuskan dalam praktik prostitusi, anak-anak yang diperkerjakan sebagai buruh kasar, anak-anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*) sesungguhnya adalah kelompok manusia yang rawan diperlakukan salah. Hak-hak dasar mereka dirampas dan mereka diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi.<sup>1</sup> Berbagai persoalan ini menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh semua anak. Hal ini memerlukan upaya yang serius untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anak di Indonesia beserta hak-hak dasar yang mereka miliki, sehingga mereka mampu untuk hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman.

UNICEF membedakan anak terlantar atau anak jalanan menjadi dua kategori, yaitu: *children on the street* and *children of the street*. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan erat dengan keluarga atau orang tuanya.<sup>2</sup> Peter Devis memberikan pemahaman bahwa fenomena meningkatnya jumlah anak terlantar atau anak jalanan merupakan sebuah gejala global. Pertumbuhan urbanisasi yang menyebabkan membengkaknya jumlah titik area kumuh di kota-kota besar di negara-negara yang tengah berkembang maupun negara maju sekalipun memaksa sejumlah anak yang terlahir di keluarga yang terjatuh dalam kurungan kemiskinan untuk turun kejalan demi mencari tambahan uang demi kelangsungan hidup dirinya dan keluarga.

Kota-kota besar di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini menimbulkan beberapa permasalahan besar di bidang sosial, budaya, ekonomi dan di bidang-bidang lainnya. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi di kota-kota

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

<sup>2</sup> Abd Chayyi Fanani, *Pesantren Anak Jalanan*, (Surabaya: Penerbit Alpha, 2008), 35.  
26 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

besar adalah permasalahan meningkatnya jumlah anak terlantar yang keberadaannya seharusnya dipelihara dan diberikan perlindungan oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>3</sup>

Bertambahnya populasi anak terlantar yang identik dengan kemiskinan menjadi indikator adanya kenaikan jumlah penduduk atau jumlah keluarga miskin di sebuah daerah. Kemiskinan di daerah-daerah urban yang memaksa seseorang untuk bertindak melakukan segala cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini berpotensi besar menimbulkan adanya atau bahkan meningkatnya jumlah pengemis, pengamen dan gelandangan di daerah urban. Dalam hal ini, anak-anak dari keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan akan menjadi korban. Anak-anak dari keluarga miskin kerap kali menjadi anak terlantar yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagian dari mereka ada yang dimanfaatkan sebagai pengamen jalanan, ada pula yang menjadi pengemis dengan cara dijadikan sebagai alat untuk menimbulkan rasa iba sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan uang dan tragisnya sebagian anak terlantar dipelihara oleh manusia tidak bertanggung jawab untuk dijadikan alat pemuas nafsu.

Anak terlantar juga sama dengan anak-anak lainnya yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan berpartisipasi secara wajar seperti anak-anak lainnya sesuai dengan harkat dan martabat dirinya sebagai seorang manusia.

Negara Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan pun telah menjamin hak dari anak-anak terlantar sesuai dengan amant UUD NRI 1945 dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Pasal ini merupakan dasar dalam pemberian hak konstitusional bagi anak-anak terlantar dan seluruh warga

---

<sup>3</sup> Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 247.

negara yang terjat dalam lingkaran kemiskinan untuk dilindungi dan dijamin keberlangsungan hidupnya oleh negara. Ayat dalam pasal tersebut secara jelas telah menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab langsung dalam pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar.

Permasalahan mengenai anak terlantar bukan hanya merupakan tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan untuk mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun bila dilihat dari sisi keberadaan pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang juga berfungsi sebagai pelindung seluruh warga negara, porsi tanggungjawab yang diemban pemerintah dalam pemeliharaan dan penanganan anak terlantar tentu menjadi jauh lebih besar. Terlebih lagi permasalahan anak terlantar tidak hanya menyangkut permasalahan sosial semata, melainkan juga terkait dengan persoalan-persoalan di bidang kehidupan lainnya secara sistemik.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Anak**

R.A. Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karenanya mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.<sup>4</sup> Menurut Kartini Kartono anak adalah manusia normal yang masih muda usianya dan masih sedang menentukan identitasnya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Romli Atmasasmita anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu yang masih belum dewasa dan belum kawin.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>4</sup> R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1964), 120.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung: Sinar Baru, 1981), 187.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakanlan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, (Bandung: Armico, 1983), 230.

menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>7</sup>

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak mengandung dua dimensi pengertian hukum, yaitu :<sup>9</sup>

1. Dimensi hukum perdata. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan materiel yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.
2. Dimensi hukum pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku tindak pidana (*kindermoor*).

### **Negara Kesejahteraan**

Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 53

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1

<sup>9</sup> Maulana Hassan Waddang, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Grasindo, 2000), 45-46

ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (Negara hukum sosial).<sup>10</sup> Munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya merupakan ciri khas utama negara kesejahteraan (*welfare state*). Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (*staatsonthouding*) menjadi *staats bemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>11</sup>

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh konsep legal state telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan caramengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian

---

<sup>10</sup> Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), 22-23.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3-4  
30 Qawwam Vol. 14, No. 2 (2020)

secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum *welfare state* (Negara kesejahteraan).

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yakni : bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan memiliki sifat mengikat. Bahan hukum sekunder yakni: bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih detail dari bahan hukum primer untuk menyokong proses analisis kasus permasalahan yang diangkat seperti buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah semua bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus umum dan lain-lain. Teknik analisis bahan hukum menggunakan content analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara kesejahteraan adalah personifikasi dari tata hukum.<sup>12</sup> Artinya, dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan pada hukum (negara hukum). Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lundeberg berpendapat: *Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.*<sup>13</sup> Negara hukum materiil ini biasa juga dikenal dengan istilah *welfarestate*. Kunci pokok dalam *welfarestate* adalah mengenai adanya keterjaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara oleh negara.

---

<sup>12</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 225.

<sup>13</sup> Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), 9.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut faham *welfarestate*. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para *founding fathers* bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdiri dengan konsep *walhaarstaat*. Dalam pilihan terkait konsepsi Indonesia sebagai *welfarestate* ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.<sup>14</sup> Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

Tujuan dari penjalanan roda pemerintahan di seluruh negara dunia tentu didasarkan pada tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai negara. Begitu pula dengan pemerintahan Negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia dalam hal pemeliharaan dan penanganan anak-anak terlantar, telah memiliki aturan-aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Pada tahun 1979, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Namun instrumen hukum ini nampaknya belum mampu menangani permasalahan anak-anak di Indonesia yang kondisinya semakin terpuruk. Kemudian setelah ada UU ratifikasi *Convention on the Right of the Child*, Indonesia kembali mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengangkat kondisi anak-anak di Indonesia serta memberikan perlindungan tanpa terkecuali bagi seluruh anak-anak di negara ini.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,

---

<sup>14</sup> M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), 299.



keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak-hak yang dimiliki oleh seluruh anak harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan. Pasal 2 dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut telah dipaparkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, dan perkembangan yang harus dijadikan landasan dalam seluruh tindakan yang diambil dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak ditujukan agar terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>15</sup>

Pada realitanya, anak-anak terlantar menerima perlakuan tidak manusiawi baik secara fisik maupun psikis. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi bila mendengar dan menonton berita di media televisi maupun melalui media sosial mengenai berbagai permasalahan keji yang menimpa anak-anak di Indonesia khususnya anak-anak terlantar. Banyak pula kasus dimana anak-anak terlantar yang dieksploitasi, baik sanak keluarga mereka maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan intensitas kerja yang di luar batas kemampuan, dan bahkan menjadikan mereka sebagai korban trafficking yang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu (PSK).

Tindakan-tindakan eksploitasi anak yang tidak manusiawi tersebut menimbulkan dampak negatif dan bahkan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan mereka baik secara mental, fisik, spiritual, maupun sosial. Padahal telah jelas dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak sama-sama memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu masalah paling mendasar yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah kecilnya bahwa tidak adanya kemungkinan mereka untuk mendapatkan

---

<sup>15</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kesempatan mengenyam pendidikan yang layak. Disamping itu, permasalahan lainnya yang juga dialami oleh anak-anak terlantar adalah permasalahan jaminan kesehatan. Anak-anak terlantar hidup di daerah sembarang yang kumuh dan kotor serta tidak layak huni. Permasalahan ekonommi yang akhirnya menjadi faktor banyaknya kasus anak terlantar merupakan faktor dan indikator bahwa negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya.

Negara sebagai pemberi dan penjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya mengemban tanggung jawab dalam hal pembinaan dan pemeliharaan anak-anak terlantar di seluruh wilayah Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penjaminan pemberian hak-hak dasar kepada anak terlantar merupakan amanat kandungan UU NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Telah jelas bahwa pemerintah yang berada dalam posisi sebagai organ penyelenggara negara bertanggung jawab dan harus mampu menjalankan amanat konstitusi dalam memberikan hak dan memberikan perlindungan hukum bagi anak terlantar di seluruh Indonesia.

Permasalahan mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah sebagai organ penyelenggara negara saja. Pemeliharaan dan perlindungan seluruh anak termasuk anak terlantar adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama sesuai dengan isi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Maka, untuk mengusahakan pemberian perlindungan terhadap anak terlantar adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia yang dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 38.

## KESIMPULAN

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Maka dalam hal ini juga termasuk memberikan kesejahteraan bagi anak terlantar. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dengan porsi yang besar dalam memberikan hak-hak dasar dan perlindungan hukum kepada anak-anak terlantar di seluruh Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1983), *Problema Kenakanlan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Bandung: Armico
- Chayyi, Abd Fanani. (2008). *Pesantren Anak Jalanan*. Surabaya: Penerbit Alpha.
- Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- HR, Ridwan.(2011), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. (1981), *Gangguan-Gangguan Psikis*, Bandung: Sinar Baru
- Koesnoen, R.A. (1964), *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, Bandung: Sumur
- Mustafa, Bachsan, (1982), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni
- Raharjo, Satjipto. (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Syaripin, Pipin. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemardi. (2010). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Suryanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Imam Sukadi, dkk.

Waddang, Maulana Hassan. (2000), *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo

Yamin, M.. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.